

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN (APER)

Andy Victor¹Rindy Ayu Wandari Iryanto²

¹²Program Studi Manajemen Informatika PKN LPKIA

Jln. Soekarno Hatta No. 456 Bandung 40266, Telp. 022 75642823, Fax. 022 7564282

Email : bt_393@yahoo.com¹, ayu@nii-ltd.com²

Abstrak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma - norma hukum untuk menutup biaya produksi barang - barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut. Pajak Pemanfaatan Air Permukaan merupakan salah satu penerimaan pemerintah daerah Jawa Barat dari sector pajak daerah. Penggunaan Pajak pemanfaatan Air Permukaan yang baru dimulai pada tahun 1998 / 1999 yang sebelumnya merupakan retribusi penerimaan pemerintah Jawa Barat. Pemerintah Pusat dalam beberapa tahun terakhir ini telah melakukan perubahan, diantaranya adalah perubahan dari *sistem official assessment* menjadi *self assessment*. Dengan sistem *self assessment* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Implikasi dari sistem *self assessment* ini adalah bahwa instansi yang bertugas memungut pajak harus memiliki kemampuan baik untuk mengadministrasikan pajak, serta wajib pajak harus diawasi oleh fiskus (pemerintah) sehingga dapat diketahui apakah kewajiban pajak telah dijalankan dengan benar atau tidak oleh wajib pajak yang bersangkutan. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan sistem informasi ini adalah *Structured System Analysis and Design (SSAD)*. Hal ini disebabkan karena metodologi ini dapat menggambarkan sistem secara utuh dan juga dapat memecahkannya menjadi lebih rinci. Oleh karena itu, alat yang digunakan untuk melakukan pengembangan sistem adalah bagan alir dokumen (*Mapping Chart*), Diagram Konteks (*Context Diagram*), Diagram Alir Data (*Data Flow Diagram*), Kamus Data, *Gant Chart* dan *Structure Chart*.

Kata Kunci : Pajak Air Permukaan, Sistem Self Assessment, SSAD

1. Pendahuluan

Pada era globalisasi sekarang ini, pemerintah berusaha untuk semakin meningkatkan perkembangan di segala bidang guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional maka dibutuhkan sumber pendapatan yang tinggi untuk membiayai pembangunan nasional. Di Indonesia Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang paling utama diantaranya berasal dari pajak. Salah satu pajak yang termasuk dalam pajak daerah yaitu Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Sistem Perpajakan Daerah mengenai pengenaan pajak pemanfaatan air dimaksudkan pula untuk adanya pengendalian akan pemanfaatan air, agar ketersediaan air tetap terpelihara dan tepenuhinya berbagai kebutuhan sesuai dengan fungsi air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Permasalahan yang ditemukan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung III, antara lain adalah :

1. Pembaharuan data lapangan dan jumlah pajak yang baru, hanya dilakukan pada proses pembayaran saja.
2. Pelaporan yang kurang optimal, membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam untuk membuat satu laporan.

3. Pemantauan fisik berkala yang tidak optimal.

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas maka perlu membatasi ruang lingkup dari permasalahan tersebut. Adapun permasalahan yang akan dibahas meliputi :

1. Sistem ini diterapkan untuk pengambilan dan pemanfaatan pajak air permukaan yang bersifat komersil.
2. Sistem ini hanya melakukan pemungutan terhadap pajak air permukaan.

Adapun tujuan dari perancangan sistem yang baru adalah sebagai berikut :

1. Adanya pembaharuan data saat menerima hasil keputusan dari Kepala Dinas.
2. Mempercepat proses pembuatan laporan dengan menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu dengan membuat sistem basis data.
3. Adanya proses pemantauan fisik berkala yang dilakukan oleh dinas teknis, sehingga dapat meminimalisir keluhan wajib pajak mengenai ketidaksesuaian data yang ada di lapangan dengan data yang ada di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung III.

2. Dasar Teori

Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan

Gambar 1 DFD Level 0 Sistem Berjalan

3.2 Evaluasi

3.2.1 Tujuan Operasional Sistem Usulan

Dengan ditemukannya berbagai masalah dari sistem yang sedang berjalan maka diharapkan sistem yang baru ini dapat mengantisipasinya sehingga dapat lebih menunjang kelancaran, keakuratan, dan efisiensi waktu dari setiap proses yang ada, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan yang akan dicapai setelah rancangan sistem baru ini ditetapkan yaitu :

1. Dengan adanya sistem baru diharapkan pemungutan pajak air permukaan dapat lebih baik dibanding sistem lama.
2. Dengan sistem baru ini diharapkan dapat mempercepat dalam pembuatan laporan kepada pimpinan.
3. Sistem baru ini diharapkan dapat meminimalisir keluhan dari wajib pajak.

3.2.2 Gagasan Untuk Mencapai Tujuan

Untuk dapat merealisasikan tujuan operasional sistem baru yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, di bawah ini dijabarkan mengenai uraian gagasan untuk mencapai tujuan tersebut.

1. Merancang suatu sistem aplikasi basis data.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis untuk melakukan pemantauan fisik secara berkala setiap tanggal 5, sehingga dapat menghasilkan laporan potensi air yang akurat.

3.3 Aliran Proses Sistem Usulan

Uraian naratif mengenai aliran informasi beserta gambaran batasan otomatisasi pada sistem yang diusulkan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

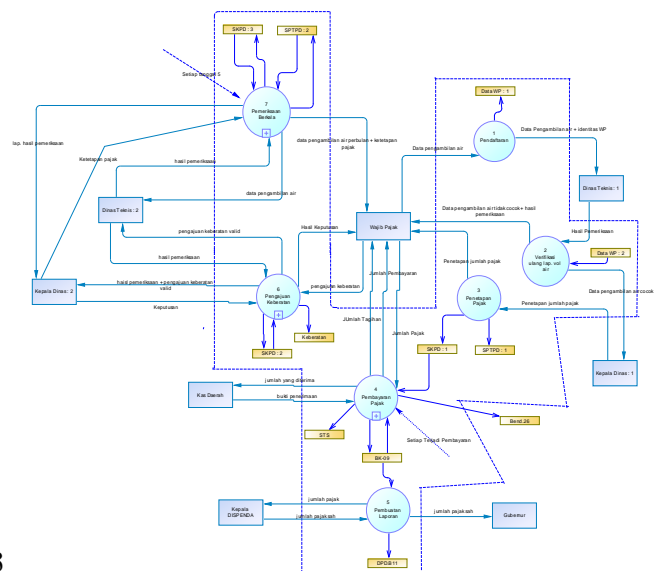
1. Bagian Seksi pajak non PKB / BBNKB akan menerima data wajib pajak untuk melakukan pendaftaran. Bagian Seksi pajak non PKB / BBNKB akan menginput data wajib pajak ke dalam file wajib pajak.
2. Bagian Seksi pajak non PKB / BBNKB akan menyerahkan data wajib pajak tersebut kepada Dinas Teknis untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan akan diberikan dinas teknis kepada bagian seksi pajak non PKB / BBNKB untuk disesuaikan dengan data WP yang diberikan wajib pajak saat pendaftaran, jika data yang diberikan tidak cocok maka data WP dan hasil pemeriksaan akan di kembalikan kepada wajib pajak, tetapi jika sesuai maka data WP dan hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada Kepala Dinas PSDA.
3. Kepala Dinas PSDA akan menyerahkan penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada bagian seksi pajak non PKB

/ BBNKB yang kemudian akan diinputkan ke dalam komputer (file SKPD dan SPTPD) dan mengarsipkannya serta menyerahkannya kepada wajib pajak.

4. Pada Saat wajib pajak akan membayar, bagian seksi pajak non PKB / BBNKB akan melihat data wajib pajak dari file Wajib Pajak dan membuka file transaksi untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
5. Bagian Seksi pajak non PKB / BBNKB akan mencetak tanda bukti penerimaan sebanyak 3 rangkap, lembar pertama akan diserahkan kepada wajib pajak, lembar kedua akan di arsipkan dan dicatat ke dalam buku. Lembar ketiga beserta uangnya akan disetorkan kepada Kas Daerah. Dan Kas daerah akan memberikan Surat Tanda Setoran kepada bagian seksi pajak non PKB / BBNKB untuk di arsipkan.
6. Berdasarkan hasil transaksi yang telah dilakukan oleh wajib pajak, bagian seksi pajak non PKB / BBNKB akan membuat laporan yang nantinya akan diserahkan kepada Kepala DISPENDA dan Gubernur Jawa Barat.
7. Jika ada wajib pajak yang ingin mengajukan keberatan, maka bagian seksi pajak non PKB / BBNKB akan mengumpulkan berkas – berkas seperti SPKD dan SPTPD dan menyerahkannya kepada Dinas Teknis untuk diperiksa kebenarannya. Hasil Pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada Kepala Dinas PSDA beserta surat pengajuna yang diberikan wajib pajak. Kepala Dinas akan memberikan keputusan dan hasil keputusan tersebut akan diupdate oleh bagian seksi pajak non PKB / BBNKB sebelum diberikan kepada wajib pajak.

3.3.1 DFD Level 0 Sistem Usulan

Berikut ini gambar DFD level 0 Sistem Informasi Pemungutan Pajak Air Permukaan usulan sesuai dengan uraian naratif yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.



Gambar 2 DFD Level 0 Sistem Usulan

Gambar 3 Dialog Screen Pendaftaran

Gambar 4 Dialog screen SKPD

Gambar 5 Dialog screen Transaksi Pembayaran Pajak

Gambar 6 Dialog Screen Pengajuan Keberatan

4. Rencana Implementasi

Rencana implementasi merupakan tahap awal dari penerapan sistem dengan tujuan dari kegiatan implementasi sistem yang baru ini, agar sistem yang baru dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Langkah – langkah kegiatan pengimplementasian sistem adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan Fasilitas
Pengadaan HW & SW serta menyiapkan lokasi ruangan untuk pemasangan konfigurasi jaringan.
2. Install HW & SW
Instalasi HW & SW sesuai dengan konfigurasi

3.4 Rancangan Antar Muka

yang telah di spesifikasikan.

3. Membuat database dan programming
Membuat basis data dan aplikasi yang telah dirancang.
4. Test komponen program dan perbaikan program
Melakukan test pada komponen program dengan metoda white box testing (menginput data pada program dengan data yang benar/seharusnya) dan black box testing (input data yang salah) terhadap semua kondisi input, proses, dan output dan dengan strategi top-down (dimulai pada modul tertinggi ke modul terendah pada struktur chart).
5. Test kompatibilitas HW & SW dan perbaikan
Melakukan testing pada kompatibilitas HW & SW, meliputi :
 - a. Test Fungsi
 - b. Test Kecepatan akses
 - c. Test Kecepatan proses
 - d. Test kapasitas memori
6. Testing Sistem dan perbaikan sistem
Testing prosedur yang di mulai dari awal sampai akhir program.
7. Membuat dokumentasi prosedur
 - a. User Manual, buku petunjuk untuk pemakai yang berisikan sistem aplikasi secara umum, cara penggunaan aplikasi secara rinci, definisi data, definisi kesalahan (kesalahan pada aplikasi), serta daftar istilah yang di pakai dalam sistem aplikasi.
 - b. Operasi Manual, berisi petunjuk pengoperasian sistem komputer.
 - c. Instalasi Manual, berisi petunjuk cara menginstall HW & SW pada sistem yang baru.
 - d. Dokumen Aplikasi, berisi dokumentasi dari sistem aplikasi (database & program).
8. Penyiapan data
Yaitu kegiatan untuk menyiapkan data awal yang harus ada pada komputer ketika sistem usulandijalankan. Dengan konversi data dari kertas lepas atau arsip yang sudah ada, dengan menginput ke dalam basis data yang ada pada komputer.

9. Pelatihan
 - a. Menyiapkan materi pelatihan seperti transparansi dan file video yang di maksudkan untuk presentasi dalam pengoperasian aplikasi yang telah dibuat.
 - b. Melakukan pelatihan langsung kepada database administrator dan penggunaan aplikasi (end user) dalam mengoperasikan aplikasi.

10. Instalasi & Peralihan Sistem

Instalasi dan peralihan sistem merupakan suatu proses meletakkan sistem baru. Strategi yang digunakan adalah strategi paralel, dimana secara bertahap sistem lama akan tergantikan dengan sistem yang baru, karena pengguna (user) perlu penyesuaian dan kemungkinan belum terbiasa dengan sistem baru.

4.1 Rencana Aktifitas dan Waktu

Untuk lebih jelas secara keseluruhan dari rencana dan waktu yang dibutuhkan secara keseluruhan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

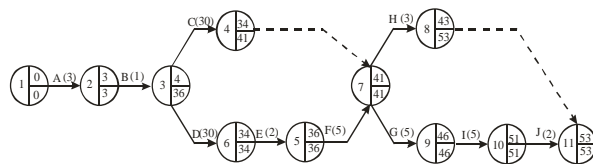
Untuk lebih jelas secara keseluruhan dari rencana penerapan sistem ini dapat di lihat pada table di bawah ini

No	Kegiatan	Penjelasan	Kegiatan yang mendahului	Waktu/hari (Tn)
1	A	Menyiapkan Fasilitas	-	3
2	B	Install HW & SW	A	1
3	C	Membuat database dan programming	B	30
4	D	Test komponen program dan perbaikan program	B	30
5	E	Testing Komparabilitas HW & SW dan perbaikan	C & D	2
6	F	Testing Sistem dan perbaikan sistem	E	5
7	G	Membuat Dokumen Prosedur	F	5
8	H	Penyiapan data	F	3
9	I	Pelatihan	G & H	5
10	J	Instalasi & Peralihan Sistem	I	2

Tabel 1 Rencana Aktifitas dan Waktu

4.2 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan yang dilakukan akan digambarkan dengan menggunakan *Critical Path Method (CPM)*, dimana akan tergambaran konsumsi waktu yang telah dijadwalkan dan lintasan waktu yang akan digunakan oleh kegiatan tersebut.



Gambar 7 Critical Path Method

4.3 Kebutuhan Sumber Daya

Dalam perancangan serta pengelolaan operasional sistem baru, dibutuhkan beberapa sumber daya perangkat pikir (Brainware). Yang terdiri dari :

1. Sistem Analis (1 Orang)
Bertugas sebagai penanggung jawab dan melakukan analisa terhadap pengembangan sistem serta melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem baru yang telah dirancang.
2. Programmer Aplikasi merangkap database administrator (2 Orang)
Mempunyai tugas untuk membuat database, desain aplikasi serta konstruksi coding sesuai dengan sistem yang telah dirancang dan juga bertanggungjawab terhadap pemeliharaan database.
3. Teknisi (1 Orang)
Menangani instalasi jaringan serta pemeliharaan hardware.
4. Operator (2 Orang)
Bertugas melakukan pengolahan data dan menjalankan operasional sistem yang telah dirancang.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari penelitian yang kami lakukan, berikut simpulan yang dapat kami uraikan:

1. Hasil rancangan masukan dan keluaran pada sistem pemungutan pajak yang diusulkan, dapat membantu dalam pengelolaan data pajak serta pendokumentasian terhadap data pajak tersebut.
2. Dengan adanya sistem pemungutan pajak berbasis komputer, diharapkan dapat mempermudah kegiatan pengolahan data pajak dan mengorganisasikan secara teratur. Sehingga mampu mereduksi pekerjaan setiap proses
3. Hasil rancangan dari sistem ini dapat mengurangi keluhan dari wajib pajak.

Saran atau masukan yang dapat kami berikan untuk menunjang atau pengembangan sistem selanjutnya, sebagai berikut:

1. Membuat sistem Pembayaran melalui ATM, dengan begitu wajib pajak akan selalu ingat kewajiban membayar pajak karena telah memudahkan dalam proses pembayaran.
2. Membuat sistem Pembayaran Online, sehingga memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dimana pun.

DAFTAR PUSTAKA

1. AlFatta Hanif. 2007. *Analisis & Perancangan Sistem Informaasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*. Penerbit Andi. Yogyakarta
2. Amsyah, Zulkifli, Drs., 2005. *Manajemen Sistem Informasi*. STIA-LAN. Bandung
3. Jogiyanto, Prof., 2005. *Analisis dan Desain*. Penerbit Andi. Yogyakarta
4. Mardiasmo, Prof. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi. Yogyakarta

5. Peraturan Daerah Jawa Barat Tahun 2003
Mengenai Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
6. Resmi Siti. 2009. *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 5*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
7. Supramono, Prof. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Andi. Yogyakarta
8. W.J.S Purwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*
9. [Http://diglib.ui.ac.id/libry2/detail.isp?id=75484](http://diglib.ui.ac.id/libry2/detail.isp?id=75484) Download tanggal 11 Mei 2011
10. [Http://garuda.dikti.go.id/jurnal/pajak air](http://garuda.dikti.go.id/jurnal/pajak%20air) Download tanggal 11 Mei 2011